



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita sehingga keinginan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2022 dapat terwujud.

Dalam penulisan Rencana Kerja ini dijabarkan lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2020 dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan maupun pedoman bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan pelayanan umum yang meliputi penanaman modal dan pelayanan Perizinan di Kota Lubuklinggau. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2020 memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kota Lubuklinggau pada satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2020.

Sangat disadari adanya keterbatasan dan kekurangan isi Rencana Kerja ini yang digunakan sebagai acuan untuk mendukung keberhasilan perencanaan




kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2020, oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan sumbang saran dan kritik untuk penyempurnaan Rencana Kerja ini sesuai kondisi strategis dan potensi di Kota Lubuklinggau.

Lubuklinggau, Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Lubuklinggau




HENDRA GUNAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19840510 200212 1 003



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, yang mengacu pada RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD (KUA) serta penentuan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA PPAS yang disepakati akan menjadi acuan dalam proses penyusunan APBD.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus diselesaikan sebelum Bulan Maret tahun berjalan (2021) sedangkan RKPD harus diselesaikan pada Bulan Maret tahun berjalan. Dokumen APBD tahun pelaksanaan RKPD disahkan paling lambat 31 Desember 2021. RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun 2022. Pengintegrasian RKPD dalam proses penganggaran daerah diterjemahkan dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA PPAS dan RKA SKPD. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2022 memuat arah kebijakan yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan yang berkesinambungan dengan RKPD Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)



- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran negara RI Tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara RI Nomor 4724);
- g. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244)
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupatenkota;
- q. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- r. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota lubuklinggau;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2021 adalah :

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan usulan KUA, PPAS dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.



2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

SKPD

- 2.1. Gambaran Umum
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Tahun 2021 Serta Realisasi Capaian Renstra SKPD.



2.2. Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau yang berhubungan dengan Prioritas.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Pembangunan SKPD.

3.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022

3.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Capaian Renstra.

3.3. Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju.

3.4. Sumber Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.

4.2. Kaidah Pelaksanaan.

4.3. Rencana Tidak Lanjut.

Lampiran – lampiran:

1. Matrik Indikator Kinerja
2. Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan
3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Gambaran Umum

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pemerintah kota Lubuklinggau membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan



terpadu satu pintu kota lubuklinggau dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan perizinan secara nasional maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau untuk menjawab tantangan pada tatanan implementasi pelayanan penanaman modal dan Perizinan Satu Pintu dalam memberikan pelayanan investasi di kota Lubuklinggau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau, maka jenis izin yang didelegasikan saat ini berjumlah 83 Jenis Izin. Adapun izin yang dikenakan retribusi yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berikut Realisasi Penerimaan PAD dari Retribusi Izin Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau Tahun 2020 :



Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Hasil Retribusi Tahun 2020

No	Jenis Retribusi	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Penerimaan s/d 31 Desember (Rp.)	Persentase Penerimaan (%)
1	Retribusi Izin mendirikan bangunan	500.000.000	264.797.500	52,96

Sumber : *Bendahara Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau*

Selama periode tahun anggaran 2020, anggaran keuangan sebesar **Rp.1.733.472.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.1.714.217.728,-** dengan prosentase **98,89%**. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau dipergunakan sebagai belanja pembayaran Gaji pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau selama tahun Anggaran 2020, dengan data sebagai berikut :

- Target BTL Tahun 2020 sebesar **Rp.3.564.456.411,-**
- Realisasi BTL Tahun 2020 sebesar **Rp.3.134.240.647,-**

Belanja Langsung (BL) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau dipergunakan sebagai belanja/biaya pengeluaran rutin keseluruhan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau selama tahun Anggaran 2020, dengan data sebagai berikut :

- Target Pengeluaran Tahun 2020 sebesar **Rp. 1.733.472.000,-**
- Realisasi Pengeluaran Tahun 2020 sebesar **Rp 1.714.217.728,-**



Tabel 2.3
Uraian Belanja Langsung
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.12 . 2.12.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.151.031.000,00	1.136.739.584,00	98,76
2.12 . 2.12.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
2.12 . 2.12.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	196.000.000,00	185.226.757,00	94,50
2.12 . 2.12.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional	5.800.000,00	4.625.750,00	79,75
2.12 . 2.12.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84.360.000,00	84.360.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	51.823.000,00	51.466.500,00	99,31
2.12 . 2.12.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.244.000,00	66.875.200,00	99,45
2.12 . 2.12.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.235.000,00	10.235.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.140.000,00	10.000.000,00	98,62
2.12 . 2.12.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	237.000.000,00	236.620.000,00	99,84
2.12 . 2.12.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	49.040.000,00	48.300.000,00	98,49
2.12 . 2.12.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	259.989.000,00	259.930.377,00	99,98
2.12 . 2.12.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	147.600.000,00	147.600.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.441.000,00	207.322.500,00	97,44
2.12 . 2.12.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	47.000.000,00	46.500.000,00	98,94
2.12 . 2.12.01.01 . 02.10	Pengadaan Mebeleur	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	103.641.000,00	101.422.500,00	97,86
2.12 . 2.12.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.800.000,00	15.400.000,00	97,47
2.12 . 2.12.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2.12 . 2.12.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000,00	11.400.000,00	95,00
2.12 . 2.12.01.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00
2.12 . 2.12.01.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00



2.12 . 2.12.01.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	95.000.000,00	94.660.000,00	99,64
2.12 . 2.12.01.01 . 15.13	Promosi Potensi Daerah	95.000.000,00	94.660.000,00	99,64

2.12 . 2.12.01.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	15.000.000,00	149.650.144,00	99,67
2.12 . 2.12.01.01 . 16.01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	15.000.000,00	149.650.144,00	99,67
2.12 . 2.12.01.01 . 19	Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	150.000.000,00	149.650.144,00	99,77
2.12 . 2.12.01.01 . 19.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	80.000.000,00	79.687.000,00	99,61
2.12 . 2.12.01.01 . 19.03	Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perizinan	70.000.000,00	69.963.144,00	99,95
2.12 . 2.12.01.01 . 20	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	70.000.000,00	69.945.000,00	99,92
2.12 . 2.12.01.01 . 20.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	70.000.000,00	69.945.000,00	99,92
JUMLAH		1.733.472.000,00	1.714.217.728,00	98,89

2.2. Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau Tahun 2020 adalah menurut urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian, yang meliputi 8 (Delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau sampai dengan tahun 2021.

2.3. Permasalahan Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Berhubungan Dengan Prioritas

Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas penanaman modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau, maka perlu mendapat perhatian dalam penanganan operasional dinas tersebut :

1. Pada Bulan Maret Tahun 2020 kota Lubuklinggau dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh kegiatan terhambat khususnya Pelayanan Perizinan kepada masyarakat;
2. Biaya promosi tinggi, akan meningkatkan partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal;
3. Perlu disegerakan kejelasan pelaksanaan Penanaman Modal dikarenakan, adanya peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada Kota Lubuklinggau yang merupakan misi ke dua dari Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Lubuklinggau.
4. Biaya promosi dan business meeting yang cukup tinggi sehingga tidak terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.

2.4. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan telah dilaksanakan dengan optimal, didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau antara lain sebagai berikut :



- a. Masuknya Penanaman Modal di Kota Lubuklinggau akan banyak kesempatan kegiatan mengikuti Pameran Investasi, yang mana untuk kegiatan ini perlu didukung dana, karena peningkatan investasi merupakan misi kedua dari kepala Daerah Kota Lubuklinggau.
- b. Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau telah dapat memberikan pelayanan untuk 80 jenis izin dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- c. Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau dalam proses penerbitan izin melibatkan tim teknis yang anggotanya berasal dari dinas/instansi teknis serta SKPD terkait lainnya.
- d. Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau telah menerapkan sistem pembayaran retribusi langsung melalui loket Bank yang ada di Gerai Pelayanan Publik (GPP) Pacak Gale Kota Lubuklinggau.
- e. Aplikasi pelayanan informasi kepada masyarakat berbasis internet yang berupa website berisikan tata cara pengajuan izin, Undang-undang yang berkaitan dengan perizinan, dan status pengurusan dokumen yang diajukan, Media Sosial yaitu Instagram, Facebook dan Youtube sebagai wadah informasi dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau serta Pengaduan bagi masyarakat.
- f. Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau melalui sistem Informasi Online System Submission (OSS), SiCantik, SimBG dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD/ Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan program dan kegiatan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau, terkait dengan prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja (Renja). Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran proram/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan. Tabel Review Rancangan Awal RKPD Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau

2.6. Penelaahan Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Sejak diumumkannya kasus positif virus Covid-19 di Indonesia awal maret 2020, Pemerintah Kota Lubuklinggau telah membatasi layanan, menginisiasi layanan online menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan pertengahan maret 2020 dengan menetapkan protokol kesehatan dalam melakukan pelayanan perizinan. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak dilaksanakan, usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas penanaman modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau belum ada. Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau diusulkan dari masyarakat untuk lebih banyak sosialisasi baik itu keberadaan Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau sebagai pelayanan satu pintu maupun informasi Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



3.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan umum yang meliputi Penanaman Modal, perizinan usaha, dan perizinan non usaha sesuai kewenangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Sejalan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang disusun Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Lubuklinggau tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga Renstra Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 mengacu pada Renstra tersebut sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.



Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Lubuklinggau Sebagai Kota Investasi			
Misi 1 : Membangun iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi Daerah yang Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Meningkatnya nilai Investasi	1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah dan menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri	1. Peningkatan fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid penanaman modal, Penyelenggaraan pameran investasi dan Promosi Potensi Daerah
		2. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong PMA ataupun PMDN bagi peningkatan daya saing daerah	1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur dan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		3. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal	1. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi potensi yang terkait dengan investasi
		4. Memberikan kemudahan dan percepatan pemberian perizinan penanaman modal	1. Membuat kebijakan berupa peraturan Daerah yang mewajibkan bagi Pelaku Usaha untuk mengutamakan atau memprioritaskan tenaga kerja Lokal



Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatkan pelayanan perizinan dan kapasitas SDM aparatur serta menerapkan standar pelayanan
		2. Memberikan kemudahan dan percepatan pemberian perizinan penanaman modal	1. Meningkatkan pelayanan perizinan bidang penanaman modal
		3. Mengembangkan Sistem Informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal	1. Menyusun Sisytem informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta pengolahan data
		4. Koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD teknis guna meningkatkan validasi dokumen perizinan	1. Melaksanakan verifikasi dan penetapan dokumen perizinan
		5. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan izin yang dikeluarkan dengan obyek usaha	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan dan penanaman modal
		6. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat bidang perizinan dan penanaman modal	1. Sinkronisasi Penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanaman Modal dan Perizinan
		7. Meningkatkan Penunjang kelancaran administrasi perkantoran	1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran



		8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	1. Pengadaan sarana dan prasarana, Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana prasarana, gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional
		9. Meningkatkan disiplin aparatur pegawai	1. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
		10. Meningkatkan Akuntabilitas Institusi	

Misi 3 : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas birokrasi	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	1. Melakukan Transparansi informasi atau aktivitas yang dilakukan.	1. Melakukan keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.
		2. Partisipasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan.	1. Menerima masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan, Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul.
		3. Melakukan Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat.	1. Meminta kepada para pemangku kebijakan untuk memberi penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.



		4. Melakukan Koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan	1. memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga.
--	--	---	---



3.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Capaian Renstra

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau dalam menyusun rancangan rencana program dan kegiatan tahun 2021 memperhatikan indikator kinerja sasaran yang berorientasi 5 (lima) tahun kedepan, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai secara terukur, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran I.

3.3. Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau telah menyusun rancangan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju rencana tahun 2022. Adapun pagu indikatif rencana tahun 2021 dan prakiraan maju rencana tahun 2022, dapat dilihat pada Lampiran III

3.4. Sumber Dana Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan menggunakan anggaran yang bersumber pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) kota Lubuklinggau, Sumber Dana Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran III



BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

- Masuknya Penanaman Modal secara keseluruhan di kota Lubuklinggau perlu dukungan anggaran yang cukup untuk terlaksananya program-program Penanaman Modal dan perizinan.
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dengan kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi sangat menunjang tertib administrasi pelayanan perizinan, karena pada Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau belum adanya data base untuk perizinan di setiap bidang yang melayani perizinan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau merupakan SKPD dengan dua urusan yaitu urusan Penanaman Modal dan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dan Kepegawaian. Renstra 2018-2023 menangani dua urusan. Anggaran yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum ada atau tidak mendapatkan Anggaran Bantuan dari Pusat.

4.3. Rencana Tindak Lanjut



Melalui forum Musrenbangcam, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), menyampaikan prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau yang dibahas dalam Musrenbang kota untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja tahun 2021, Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Lubuklinggau mempedomani RPJMD 2018 – 2023 yang akan menghasilkan RKPD tahun 2021.

Pada akhirnya segala sesuatunya yang dilakukan tidak cukup dengan rencana strategis saja, tetapi marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kota Lubuklinggau kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih baik. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Lampiran-Lampiran

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
											Target	Anggaran			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
	(1)	(2)	(4)							(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1.1.2.1		Meningkatnya validitas Data Potensi Daerah									% Ketersediaan Data Potensi Daerah yang up to date	%		100		100		100		100		100		100		100			
1.1.2.2		Meningkatnya Sarana Informasi Penanaman Modal	2	12	2	12	1	15	14	Promosi/Publikasi peluang investasi melalui media cetak, baliho dan brosur	Output	Jumlah Sarana Informasi Penanaman Modal	Media	-	5		5	13,600,000	5	28,560,000	5	45,016,000	5	63,117,600	5	63,117,600			
											Jumlah event Promosi Penanaman Modal Per Tahun	Even Promosi		2		2		2		2		2		2		2			
1.2		Bertambahnya nilai Investasi dari pelaku usaha	2	12	2	12	1	15	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Output	Persentase penambahan Nilai Investasi	%	-	5		5	26,015,000	5	28,616,500	5	31,478,150	5	34,625,965	5	34,625,965	Bidang Perencanaan PM	Kota Lubuklinggau	Pemerintah, Pelaku Usaha Daerah dan Nasional
1.2.1		Meningkatnya Aksesibilitas Kemitraan Usaha Kecil Menengah dengan Usaha Besar								Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Menengah	Outcome	Jumlah IKM/UKM yang difasilitasi Kemitraan Usaha	IKM/UKM	-	4		4	26,015,000	6	28,616,500	8	31,478,150	10	34,625,965	10	34,625,965			
1.2.2		Meningkatnya Kemudahan Pengembangan Usaha									Jumlah Pelaku Usaha Mendapatkan Insentif Kemudahan Pengembangan Usaha Baru	Pelaku Usaha		2		2		4		6		8		8		8			
1.3		Meningkatnya Tertib Usaha Penanaman Modal								Program pengendalian dan pengawasan Penanaman modal	Outcome	% Penurunan Pelanggaran Penanaman Modal	%	-	30	80,480,000	25	134,728,000	20	97,380,800	15	107,118,880	10	117,830,768	10	179,322,968	Bid. Pengendalian & Pengawasan Penanaman Modal	DPMPPTSP Kota LLG	Pelaku Usaha

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
												Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1.3.1		Meningkatnya Tertib Administrasi Penanaman Modal					Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output	% Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	%	-	50	80,480,000	55	88,528,000	60	97,380,800	65	107,118,880	70	117,830,768	70	117,830,768			
1.3.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengawasan Penanaman					Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output	Jumlah Aparatur Wasdal yang berkompeten	Aparatur	-	2	-	2	46,200,000	4	-	6	-	8	-	8	61,492,200			
1.3.3		Meningkatnya Sarana Pendukung Pengawasan Penanaman Modal					Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output	% Ketersediaan Sarana Pendukung	%		100		100		100		100		100		100				

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
														Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
	(1)	(2)	(4)						(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1.4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan								Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	80	80	97,600,000	85	107,360,000	87	118,096,000	88	129,905,600	89	142,896,160	89	238,062,660	Bidang Perizinan	Kota LLG	Pelaku Usaha
1.4.1		Tersedianya Dukungan Teknologi Penunjang Layanan								Pengembangan Sistem informasi layanan perizinan	Output	% Layanan yang didukung Sistem Informasi	%		80	65,000,000	100	71,500,000	100	78,650,000	100	86,515,000	100	95,166,500	100	95,166,500			
1.4.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pelayanan										% Ketersediaan Aparatur Sesuai Kompetensi Per Jenis Layanan	%		80		100		100		100		100		100				
1.4.3		Meningkatnya Mekanisme dan Prosedur Pelayanan								Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Output	% Penerapan Standar Pelayanan Per-Jenis Layanan	%	-	80	97,600,000	100	107,360,000	100	118,096,000	100	129,905,600	100	142,896,160	100	142,896,160			
1.4.4		Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan								Pengembangan Sistem informasi layanan perizinan		% kecukupan Sarana Prasarana Penunjang Layanan	%		80		100		100		100		100		100				
1.4.5		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat								Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Output	% Pengaduan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100				
	1.	Meningkatnya Kualitas Aparatur									Jumlah Aparatur yang berkualitas																		
		1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur									Kinerja Sumber Daya Aparatur meningkat																		
			2	12	2	12	01.	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	780,350,000	100%	858,385,000	100%	944,223,500	100%	1,038,645,850	100%	1,142,510,435	100%	1,142,510,435	Bidang Sekeretariat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	12	2	12	01.	01.	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Output	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Jenis	100%	4 Jenis benda pos	3,750,000	4 Jenis benda pos	4,125,000	4 Jenis benda pos	4,537,500	4 Jenis benda pos	4,991,250	4 Jenis benda pos	5,490,375	4 Jenis benda pos	5,490,375			
			2	12	2	12	01.	01.	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	Jumlah rekening tagihan (Listrik, air dan telepon) yang harus dibayarkan	Jenis	100%	3 jenis rekening tagihan	162,000,000	3 jenis rekening tagihan	178,200,000	3 jenis rekening tagihan	196,020,000	3 jenis rekening tagihan	215,622,000	3 jenis rekening tagihan	237,184,200	3 jenis rekening tagihan	237,184,200			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
														Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
			2	12	2	12	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Unit	100%	13 Unit	5,000,000	13 Unit	5,500,000	13 Unit	6,050,000	13 Unit	6,655,000	13 Unit	7,320,500	13 Unit	7,320,500			
			2	12	2	12	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output	Jasa Administrasi Keuangan	Org	100%	7 org	94,760,000	7 org	104,236,000	7 org	114,659,600	7 org	126,125,560	7 org	138,738,116	7 org	138,738,116			
			2	12	2	12	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Bulan	100%	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	13,200,000	12 Bulan	14,520,000	12 Bulan	15,972,000	12 Bulan	17,569,200	12 Bulan	17,569,200			
			2	12	2	12	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Output	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	100%	50 Jenis barang	63,630,000	50 Jenis barang	69,993,000	50 Jenis barang	76,992,300	50 Jenis barang	84,691,530	50 Jenis barang	93,160,683	50 Jenis barang	93,160,683			
			2	12	2	12	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	100%	6 Jenis	70,840,000	9 Jenis	77,924,000	9 Jenis	85,716,400	9 Jenis	94,288,040	9 Jenis	103,716,844	9 Jenis	103,716,844			
			2	12	2	12	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis	100%	11 Jenis	6,100,000	11 Jenis	6,710,000	11 Jenis	7,381,000	11 Jenis	8,119,100	11 Jenis	8,931,010	11 Jenis	8,931,010			
			2	12	2	12	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Output	Peralatan rumah tangga	Jenis	100%	11 Jenis	6,670,000	6 Jenis	7,337,000	6 Jenis	8,070,700	6 Jenis	8,877,770	6 Jenis	9,765,547	6 Jenis	9,765,547			
			2	12	2	12	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Tersedianya surat Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran	100%	6 Jenis Koran	7,200,000	6 Jenis Koran	7,920,000	6 Jenis Koran	8,712,000	6 Jenis Koran	9,583,200	6 Jenis Koran	10,541,520	6 Jenis Koran	10,541,520			
			2	12	2	12	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Output	Terpenuhinya makanan dan minum pegawai	Org	100%	46 Org	59,400,000	46 Org	65,340,000	46 Org	71,874,000	46 Org	79,061,400	46 Org	86,967,540	46 Org	86,967,540			
			2	12	2	12	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah	100%	30 kali	193,000,000	30 kali	212,300,000	30 kali	233,530,000	30 kali	256,883,000	30 kali	282,571,300	30 kali	282,571,300			
			2	12	2	12	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Output	Jasa Administrasi Pengadaan barang dan jasa	Org	100%	7 Org	96,000,000	7 Org	105,600,000	7 Org	116,160,000	7 Org	127,776,000	7 Org	140,553,600	15 Org	140,553,600			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran			
												Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
	(1)	(2)	(4)				(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
		1.2 Meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur																					
			2	12	2	12	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome	Persentase sarana dan prasarana daam kondisi baik	%	100%	100%	498,120,000	100%	547,932,000	100%	602,725,200	100%	662,997,720	100%	729,297,492	100%	729,297,492	Bidang Sekeretaria t	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP	
			2	12	2	12	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	out put	Jumlah Peralatan Gedung dan Kantor	Unit		7	25,000,000	7	27,500,000	7	30,250,000	7	33,275,000	7	36,602,500	7	36,602,500			
			2	12	2	12	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	out put	Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		13	111,520,000	13	122,672,000	13	134,939,200	13	148,433,120	13	163,276,432	13	163,276,432			
			2	12	2	12	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	out put	Terpeliharnya perlengkapan gedung kantor	%		100	7,600,000	100	8,360,000	100	9,196,000	100	10,115,600	100	11,127,160	100	11,127,160			
			2	12	2	12	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	out put	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%		100	16,000,000	100	17,600,000	100	19,360,000	100	21,296,000	100	23,425,600	100	23,425,600			
			2	12	2	12	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	out put	Jumlah Gedung yang terehab	Unit		1	338,000,000	1		1	408,980,000	1	449,878,000	1	494,865,800	1	494,865,800			
			2	12	2	12	01	02	44	Pengadaan mebeuler	out put	Jumlah Mobeler	Unit				40	371,800,000											

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
														Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
	2 Meningkatnya Disiplin Aparatur									Aparatur yang mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan																			
		2.1 Meningkatkan tingkat disiplin aparatur								Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur																			
			2	12	2	12	1	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome	Tingkat kedisiplinan Aparatur	Stel	100%	100%	28,800,000	100%	31,680,000	100%	34,848,000	100%	38,332,800	100%	42,166,080	100%	42,166,080		Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	12	2	12	1	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Output	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Stel	100%	48 Org	28,800,000	48 Stel	31,680,000	48 Stel	34,848,000	48 Stel	38,332,800	48 Stel	42,166,080	48 Stel	42,166,080				
			2	12	2	12	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome	Prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	100%	100%	65,650,000	100%	26,015,000	100%	28,616,500	100%	31,478,150	100%	34,625,965	100%	34,625,965		Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
										Prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Lainnya																			
			2	12	2	12	1	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org	100%	2 org	42,000,000	2 org	26,015,000		28,616,500		31,478,150		34,625,965		34,625,965				
			2	12	2	12	1	05	Penyusunan Analisa Jabatan	Output	Jumlah Dokumen	Doc	100%	1	23,650,000	1		1		1		1		1		1			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
			2	12	2	12	1	06		(6)	(7)			(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				(22)	(23)
			2	12	2	12	1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	%	100%	100%	18,000,000	100%	19,800,000	100%	21,780,000	100%	23,958,000	100%	26,353,800	100%	26,353,800	Bidang Sekeretaria t	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP		
			2	12	2	12	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output	Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan kinerja SKPD	Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	9,900,000	2 Dokumen	9,900,000	2 Dokumen	10,890,000	2 Dokumen	11,979,000	2 Dokumen	13,176,900	2 Dokumen	13,176,900			
										Penyusunan Dokumen perencanaan	Output	Dokumen Perencanaan	dokumen	100%	5 Doukumen	5 Doukumen	-	5 Doukumen	-	5 Doukumen	-	5 Doukumen	-	5 Doukumen	-	5 Doukumen	-			
			2	12	2	12	1	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Output	Terpenuhinya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel sebagai bahan laporan keuangan konsolidasi yang di audit oleh BPK	dokumen	100%	3 doc	2 Laporan	9,900,000	2 Laporan	10,890,000	2 Laporan	11,979,000	2 Laporan	13,176,900	2 Laporan	13,176,900					
JUMLAH													1,785,000,000		1,989,515,000		2,137,646,500		2,351,411,150		2,586,552,265		2,626,082,965							

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU

110% 110% 110% 110%

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		Meningkatnya nilai Investasi			1. Jumlah Nilai Investasi	Rp	244	550		687.5		859.38		1,074		1,343		1,343				
1.1		Meningkatnya Investor Baru	2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Outcome Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru	1,740	10	136,000,000	12	149,600,000	14	164,560,000	16	181,016,000	18	199,117,600	18	199,117,600	DPMPTSP	Kota Lubuklinggau	Investor
1.1.1		Meningkatnya Daya Tarik Investasi	2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah Calon Investor	Jumlah Calon Investor		55		60		65		70		75		75				
1.1.1.1		Meningkatnya Peluang Investasi	2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan	Jumlah Potensi Usaha	Jumlah Potensi Usaha		6		6		8		10		12		12				
			2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi																		
1.1.1.2		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Outcome Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	1	1	80,000,000	1	88,000,000	2	96,800,000	4	106,480,000	6	117,128,000	6	117,128,000	DPMPTSP	Kota Lubuklinggau	Aparatur DPMPTSP
		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02 1.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi	Output Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	-	1	80,000,000	1		2	-	4	-	6	-	6				
		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02 1.01 01	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan	Ouput Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen		1		1	88,000,000	2		4	-	6	-	6				
		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02 1.01 02	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan	Ouput Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	-	1		1		2	96,800,000	4		6	-	6				
		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Output Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	-	1		1		2	-	4	106,480,000	6	117,128,000	6	117,128,000			
1.1.2		Meningkatnya Informasi Penanaman Modal Daerah	2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Output Jumlah Informasi Penanaman Modal yang dipublikasi	Informasi Penanaman Modal	-	4	136,000,000	4	136,000,000	4	136,000,000	4	136,000,000	6	136,000,000	6	136,000,000			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				(20)	(21)
1.1.2.1		Meningkatnya validitas Data Potensi Daerah	2	18	02	1.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	% Ketersediaan Data Potensi Daerah yang up to date	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
1.2		Bertambahnya nilai Investasi dari pelaku usaha	2	12	2	12	1	15	15	Program Promosi Penanaman Modal	Output	Persentase penambahan Nilai investasi	%	-	5	5	26,015,000	5	28,616,500	5	31,478,150	5	34,625,965	5	34,625,965	Bidang Perencanaan PM	Kota Lubuklinggau	Pemerintah, Pelaku usaha Daerah dan Nasional
1.2.1		Meningkatnya Aksesibilitas Kemitraan Usaha Kecil Menengah dengan Usaha Besar						Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Menengah	Outcome	Jumlah IKM/UKM yang difasilitasi Kemitraan Usaha	IKM/UKM	-	4	4	26,015,000	6	28,616,500	8	31,478,150	10	34,625,965	10	34,625,965					
1.2.2		Meningkatnya Kemudahan Pengembangan Usaha							Outcome	Jumlah Pelaku Usaha Mendapatkan Insentif Kemudahan Pengembangan Usaha Baru	Pelaku Usaha		2	2		4		6		8		8						
1.3		Meningkatnya Tertib Usaha Penanaman Modal						Program pengendalian dan pengawasan Penanaman modal	Outcome	% Penurunan Pelanggaran Penanaman Modal	%	-	30	80,480,000	25	134,728,000	20	97,380,800	15	107,118,880	10	117,830,768	10	179,322,968	Dir. Pengendalian & Pengawasan Penanaman Modal	DPMPPTSP Kota LLG	Pelaku Usaha	
1.3.1		Meningkatnya Tertib Administrasi Penanaman Modal						Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output	% Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	%	-	50	80,480,000	55	88,528,000	60	97,380,800	65	107,118,880	70	117,830,768	70	117,830,768				
1.3.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengawasan Penanaman						Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output	Jumlah Aparatur Wasdal yang berkompeten	Aparatur	-	2	-	2	46,200,000	4	-	6	-	8	-	8	61,492,200				

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1.3.3		Meningkatnya Sarana Pendukung Pengawasan Penanaman Modal		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output % Ketersediaan Sarana Pendukung	%		100		100		100		100		100		100				

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan				Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	Point	80	80	97,600,000	85	107,360,000	87	118,096,000	88	129,905,600	89	142,896,160	89	138,062,680	Bidang Perizinan	Kota LLG	Pelaku Usaha		
1.4.1	Tersedianya Dukungan Teknologi Penunjang Layanan				Pengembangan Sistem informasi layanan perizinan	%		80	65,000,000	100	71,500,000	100	78,650,000	100	86,515,000	100	95,166,500	100	95,166,500					
1.4.2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pelayanan					%		80		100		100		100		100		100						
1.4.3	Meningkatnya Mekanisme dan Prosedur Pelayanan				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	%	-	80	97,600,000	100	107,360,000	100	118,096,000	100	129,905,600	100	142,896,160	100	142,896,160					
1.4.4	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan				Pengembangan Sistem informasi layanan perizinan	%		80		100		100		100		100		100						
1.4.5	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	%		100		100		100		100		100		100						
1.	Meningkatnya Kualitas Aparatur				Jumlah Aparatur yang berkualitas																			
	1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur				Kinerja Sumber Daya Aparatur meningkat																			
			2	12	2	12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	780,350,000	100%	858,385,000	100%	944,223,500	100%	1,038,645,850	100%	1,142,510,435	100%	1,142,510,435	Bidang Sekertariat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPSTP
			2	12	2	12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Output	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Jenis	100%	4 Jenis benda pos	3,750,000	4 Jenis benda pos	4,125,000	4 Jenis benda pos	4,537,500	4 Jenis benda pos	4,991,250	4 Jenis benda pos	5,490,375	4 Jenis benda pos	5,490,375			
			2	12	2	12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	Jumlah rekening tagihan (Listrik, air dan telepon) yang harus dibayarkan	Jenis	100%	3 jenis rekening tagihan	162,000,000	3 jenis rekening tagihan	178,200,000	3 jenis rekening tagihan	196,020,000	3 jenis rekening tagihan	215,622,000	3 jenis rekening tagihan	237,184,200	3 jenis rekening tagihan	237,184,200			
			2	12	2	12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Unit	100%	13 Unit	5,000,000	13 Unit	5,500,000	13 Unit	6,050,000	13 Unit	6,655,000	13 Unit	7,320,500	13 Unit	7,320,500			
			2	12	2	12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output	Jasa Administrasi Keuangan	Org	100%	7 org	94,760,000	7 org	104,236,000	7 org	114,659,600	7 org	126,125,560	7 org	138,738,116	7 org	138,738,116			
			2	12	2	12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
					Penyediaan jasa kebersihan dan bahan pembersih kantor	Output	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Bulan	100%	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	13,200,000	12 Bulan	14,520,000	12 Bulan	15,972,000	12 Bulan	17,569,200	12 Bulan	17,569,200			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
			2	12	2	12	01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Output	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	100%	50 Jenis barang	63,630,000	50 Jenis barang	69,993,000	50 Jenis barang	76,992,300	50 Jenis barang	84,691,530	50 Jenis barang	93,160,683	50 Jenis barang	93,160,683			
			2	12	2	12	01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	100%	6 Jenis	70,840,000	9 Jenis	77,924,000	9 Jenis	85,716,400	9 Jenis	94,288,040	9 Jenis	103,716,844	9 Jenis	103,716,844			
			2	12	2	12	01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis	100%	11 Jenis	6,100,000	11 Jenis	6,710,000	11 Jenis	7,381,000	11 Jenis	8,119,100	11 Jenis	8,931,010	11 Jenis	8,931,010			
			2	12	2	12	01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Output	Peralatan rumah tangga	Jenis	100%	11 Jenis	6,670,000	6 Jenis	7,337,000	6 Jenis	8,070,700	6 Jenis	8,877,770	6 Jenis	9,765,547	6 Jenis	9,765,547			
			2	12	2	12	01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Tersedianya surat Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran	100%	6 Jenis Koran	7,200,000	6 Jenis Koran	7,920,000	6 Jenis Koran	8,712,000	6 Jenis Koran	9,583,200	6 Jenis Koran	10,541,520	6 Jenis Koran	10,541,520			
			2	12	2	12	01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output	Terpenuhinya makanan dan minum pegawai	Org	100%	46 Org	59,400,000	46 Org	65,340,000	46 Org	71,874,000	46 Org	79,061,400	46 Org	86,967,540	46 Org	86,967,540			
			2	12	2	12	01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah	100%	30 kali	193,000,000	30 kali	212,300,000	30 kali	233,530,000	30 kali	256,883,000	30 kali	282,571,300	30 kali	282,571,300			
			2	12	2	12	01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Output	Jasa Administrasi Pengadaan barang dan jasa	Org	100%	7 Org	96,000,000	7 Org	105,600,000	7 Org	116,160,000	7 Org	127,776,000	7 Org	140,553,600	15 Org	140,553,600			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		1.2 Meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur																	
			212120102	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome Persentase sarana dan prasarana daam kondisi baik	%	100%	100%	498,120,000	100%	547,932,000	100%	602,725,200	100%	662,997,720	100%	729,297,492	100%	729,297,492	Bidang Sekeretaryat	DPMPPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPPTSP
			21212010209	Pengadaan peralatan gedung kantor	out put Jumlah Peralatan Gedung dan Kantor	Unit		7	25,000,000	7	27,500,000	7	30,250,000	7	33,275,000	7	36,602,500	7	36,602,500			
			21212010224	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	out put Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		13	111,520,000	13	122,672,000	13	134,939,200	13	148,433,120	13	163,276,432	13	163,276,432			
			21212010226	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	out put Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	%		100	7,600,000	100	8,360,000	100	9,196,000	100	10,115,600	100	11,127,160	100	11,127,160			
			21212010228	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	out put Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%		100	16,000,000	100	17,600,000	100	19,360,000	100	21,296,000	100	23,425,600	100	23,425,600			
			21212010242	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	out put Jumlah Gedung yang terehab	Unit		1	338,000,000	1		1	408,980,000	1	449,878,000	1	494,865,800	1	494,865,800			
			21212010244	Pengadaan mebeuler	out put Jumlah Meubeler	Unit					40	371,800,000										

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
														Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	2 Meningkatkan Disiplin Aparatur									Aparatur yang mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan																		
		2.1 Meningkatkan tingkat disiplin aparatur pelayanan Dinas								Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur																		
			2	12	2	12	1	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome	Tingkat kedisiplinan Aparatur	Stel	100%	100%	28,800,000	100%	31,680,000	100%	34,848,000	100%	38,332,800	100%	42,166,080	100%	42,166,080	Bidang Sekeretarya t	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	12	2	12	1	03	02 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Output	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Stel	100%	48 Org	28,800,000	48 Stel	31,680,000	48 Stel	34,848,000	48 Stel	38,332,800	48 Stel	42,166,080	48 Stel	42,166,080			
			2	12	2	12	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome	Prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	100%	100%	65,650,000	100%	26,015,000	100%	28,616,500	100%	31,478,150	100%	34,625,965	100%	34,625,965	Bidang Sekeretarya t	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
										Prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Lainnya																		
			2	12	2	12	1	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org	100%	2 org	42,000,000	2 org	26,015,000		28,616,500		31,478,150		34,625,965		34,625,965			
			2	12	2	12	1	05	04 Penyusunan Analisa Jabatan	Output	Jumlah Dokumen	Doc	100%	1	23,650,000	1		1		1		1		1		1		

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU

No.	Urusan	Bid. Urusan	Program	kegiatan	sub keg.	Uraian Nama Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kebijakan/Regulasi Pendukung Investasi yang diterbitkan	DPMPTS P	1	Regulasi	120,000,000	APBD	1	Regulasi	121,320,000
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan/Regulasi Pendukung Investasi yang diterbitkan	DPMPTSP	1	Regulasi	120,000,000	APBD	1	Regulasi	121,320,000
	2	18	02	2.01	1	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	- Jumlah Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	1	Regulasi	120,000,000	APBD	1	Regulasi	121,320,000
II.	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor	DPMPTS P	65	Calon Investor	180,000,000	APBD	70	Calon Investor	181,980,000
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Investor	DPMPTSP	65	Calon Investor	180,000,000	APBD	70	Calon Investor	181,980,000
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- Even Promosi Daerah Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	DPMPTSP	3	Kali Promosi	180,000,000	APBD	2	Kali Promosi	181,980,000
III.	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% Jenis Layanan selesai sesuai standar pelayanan	DPMPTS P	100	%	230,000,000	APBD	100	%	232,530,000
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	% Jenis Layanan selesai sesuai standar pelayanan	DPMPTSP	100	%	230,000,000	APBD	100	%	232,530,000
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah Layanan yang diberikan (didukung 3 sistem pelayanan)	DPMPTSP	80	Jumlah Layanan	150,000,000	APBD	80	Jumlah Layanan	151,650,000
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	- Laporan Hasil Pemantauan	DPMPTSP	12	Laporan	80,000,000	APBD	12	Laporan	80,880,000
IV.	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% Pelaku Usaha Tertib Administrasi Ketentuan Penanaman Modal	DPMPTS P	60	%	326,122,000	APBN	65	%	329,709,342
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	% Pelaku Usaha Tertib Administrasi Ketentuan Penanaman Modal	DPMPTSP	60	%	326,122,000	APBN	65	%	329,709,342
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah Pelaku Usaha Tertib Administrasi Penanaman Modal	DPMPTSP	140	Pelaku Usaha	96,600,000	APBN	140	Pelaku Usaha	97,662,600
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Sosialisasi LKPM	DPMPTSP	4	Kali	181,222,000	APBN	4	Kali	183,215,442
	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Penurunan Pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	DPMPTSP	30	%	48,300,000	APBN	35	%	48,831,300
VI.	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DPMPTS P			2,886,000,000	APBD			2,917,746,000
	2	18	01	202		Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi	DPMPTSP	37	Pegawai	2,886,000,000	APBD	37	Pegawai	2,917,746,000
	2	18	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Pegawai yang diberi tunjangan	DPMPTSP	37	Pegawai	2,867,000,000	APBD	37	Pegawai	2,898,537,000
	2	18	01	202	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan kinerja SKPD	DPMPTSP	3	Dokumen	12,000,000	APBD	3	Dokumen	12,132,000
	2	18	01	202	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah dokumen	DPMPTSP	3	Dokumen	7,000,000	APBD	3	Dokumen	7,077,000
	2	18	01	203		Administrasi Umum	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	DPMPTS P	100	%	1,556,130,000	APBD	100	%	1,573,247,430
	2	18	01	203	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	DPMPTSP	1	Jenis	5,000,000	APBD	1	Jenis	5,055,000

No.	Uraian	Bid. Urusan	Program	kegiatan	sub keg.	Uraian Nama Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	18	01	203	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP	5	Jenis	213,000,000	APBD		5	Jenis	215,343,000
	2	18	01	203	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP	13	STNK	6,050,000	APBD		13	STNK	6,116,550
	2	18	01	203	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jasa Administrasi Keuangan	DPMPTSP	8	Orang	82,680,000	APBD		8	Orang	83,589,480
	2	18						DPMPTSP				APBD				
	2	18	01	203	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPMPTSP	2	Orang	36,000,000	APBD		2	Orang	36,396,000
	2	18	01	203	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	32	Jenis	120,000,000	APBD		32	Jenis	121,320,000
	2	18	01	203	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	7	Jenis	125,000,000	APBD		7	Jenis	126,375,000
	2	18	01	203	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	DPMPTSP	3	Jenis	15,000,000	APBD		3	Jenis	15,165,000
	2	18	01	203	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Peralatan rumah tangga	DPMPTSP	11	Jenis	15,000,000	APBD		11	Jenis	15,165,000
	2	18	01	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	15	Jenis	250,000,000	APBD		30	Jenis	252,750,000
	2	18	01	203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhinya makanan dan minum rapat	DPMPTSP	20	kali	35,000,000	APBD		20	kali	35,385,000
	2	18	01	203	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DPMPTSP	30	Kali	250,000,000	APBD		30	Kali	252,750,000
	2	18	01	203	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	- Jasa Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	10	Orang	173,400,000	APBD		10	Orang	175,307,400
	2	18						DPMPTSP				APBD				
	2	18	01	203	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP	13	Unit	180,000,000	APBD		13	Unit	181,980,000
	2	18	01	203	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	100	%	35,000,000	APBD		100	%	35,385,000
	2	18	01	203	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	DPMPTSP	100	%	15,000,000	APBD		100	%	15,165,000
	2	18	01	204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Tingkat Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	DPMPTSP	100	%	31,800,000	APBD		100	%	32,149,800
	2	18	01	204	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	DPMPTSP	53	stel	31,800,000	APBD		53	stel	32,149,800
	2	18	01	207		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Pengadaan Barang daerah penunjang urusan pemerintah	DPMPTSP	100	%	30,900,000	APBD		100	%	36,400,000
	2	18	01	207	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	- Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	DPMPTSP	6	unit	30,900,000	APBD		7	unit	36,400,000
											5,360,952,000					5,425,082,572

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Lubuklinggau

HENDRA GUNAWAN,S.STP,M.Si
Pembina Tk. I / IV. b
NIP. 19840510 200212 1 003